

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN
PURWOREJO**



Diajukan oleh :

Reynaldi Oktavianus.S

NPM : 170512789
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN
PURWOREJO**



Diajukan Oleh :

Reynaldi Oktavianus.S

NPM : 170512789

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada Tanggal 21 Desember 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Linda", with a horizontal line underneath it.

Linda, SH., M.Kn.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN
PURWOREJO**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Januari 2021
Tempat : Yogyakarta via Daring



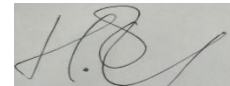
Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M.

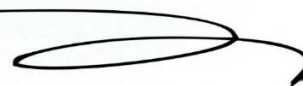
Sekretaris : Linda, SH., M.Kn.

Anggota : FX. Endro Susilo, SH., LL.M.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Orang Yang Meraih Kesuksesan Tidak Selalu Orang Yang Pintar, Tapi Orang
Yang Selalu Meraih Kesuksesan Adalah Orang Yang Gigih Dan Pantang
Menyerah”

(Susi Pudjiastuti)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Suhardi Dan Ibu Yuliana selaku orang tua dari penulis.
2. Adik-adik penulis yaitu Kristina Oktaviani.S dan Daniel Febrianto.S .
3. Sahabat-Sahabat Penulis Pandu Artha Waskita Mukti , Filippo Apriando, Elfanrio Wijaya, Reinardus Juan Fernaldy, Anastasia Tio, James Reclé yang telah memberi semangat serta teman-teman yang mendorong untuk lebih maju dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dan tempat curhat juga.
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum 2017 yang telah memberi semangat serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
5. Partai Mahasiswa Peduli sebagai wadah maupun tempat bagi penulis untuk mengembangkan diri serta mendapatkan banyak pengalaman dan teman-teman baru.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini dengan lancar karena penulis sadar bahwa pertolongan Tuhan teramat besar sehingga dukungan doa dari orang tua juga berperan besar dalam proses mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo”, penulis menyadari bahwa pada dasarnya melibatkan banyak pihak yang dengan ikhlas dan sukarela untuk membantu penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus karena berkat Rahmat dan Kasih-Nya yang senantiasa memberikan berkat, perlindungan, kekuatan, kesabaran serta jalan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Ibu Linda, SH., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing dalam proses mengerjakan Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis sedari awal sampai saat ini dengan ketulusan tanpa rasa lelah dengan penuh

kesabaran dalam menghadapi penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan lancar.

5. Ibu Maria Dini Handajani, S.T.,M.AP. , Bapak Daniel Eko Aryanto, S.T. M.Ling. serta Ibu Dian Puji Astuti sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini sekaligus sebagai pihak yang mengurus bagian sampah serta bagian penegakan hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
6. Bapak Amat Jawari, S.E. dan Bapak Setyo Haryadi sebagai Kepala Pasar pada pasar yang terbesar di Kabupaten Purworejo serta kepada pedagang pasar dan juga Bapak Daniel Eko Aryanto, S.T. M.Ling. selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dalam bidang penegakan hukum yang telah secara sukarela menjadi responden dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Suhardi Dan Ibu Yuliana selaku orang tua penulis yang memberikan semangat , doa dan selalu memberikan motivasi kepada penulis
8. Pandu Artha Waskita Mukti, Filippo Apriando, Elfanrio Wijaya, Reinardus Juan Fernaldy, Anastasia Tio, James Reclé sebagai sahabat penulis yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Endria Kurnia Dewi, S.H. dan Maria Wulan, S.H. sebagai kakak tingkat dan alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi
10. Semua pihak yang telah terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

Penulis menyadari dalam membuat penulisan hukum/skripsi masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari kata maupun dari isinya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan sekali kritik maupun saran yang bersifat membangun dalam rangka menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purworejo, 3 Desember 2020

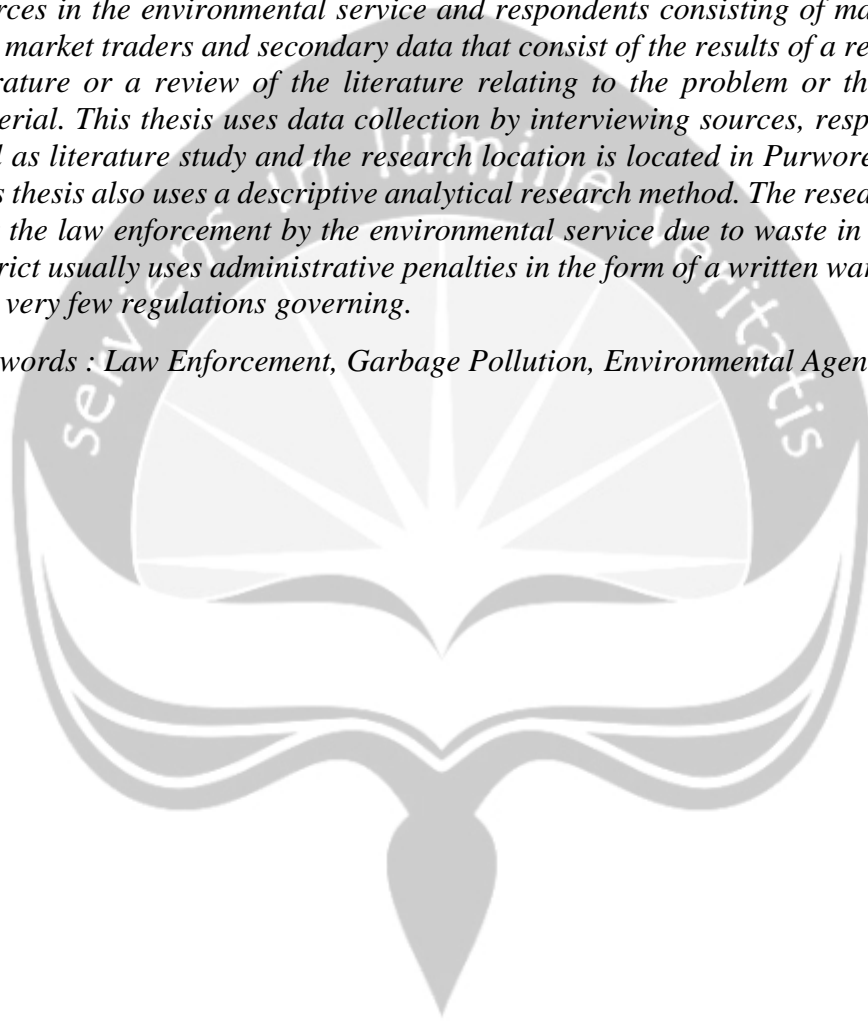


Reynaldi Oktavianus.S

ABSTRACT

The objectives of the thesis entitled Law Enforcement by the Environmental Agency on Pollution Due to Garbage in Purworejo Regency are to determine law enforcement against environmental polluters in Purworejo Regency and also to find out what obstacles occur in enforcing the law against environmental polluters in Purworejo Regency. This type of research used in this thesis is empirical legal research, this thesis also used primary data that consisting of direct interviews with sources in the environmental service and respondents consisting of market heads and market traders and secondary data that consist of the results of a review of the literature or a review of the literature relating to the problem or the research material. This thesis uses data collection by interviewing sources, respondents as well as literature study and the research location is located in Purworejo district. This thesis also uses a descriptive analytical research method. The research results that the law enforcement by the environmental service due to waste in Purworejo district usually uses administrative penalties in the form of a written warning letter and very few regulations governing.

Keywords : Law Enforcement, Garbage Pollution, Environmental Agency



DAFTAR ISI

Table of Contents

| | |
|--|-----|
| SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | xii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Batasan Konsep..... | 21 |
| H. Sistematika Penulisan Skripsi | 23 |
| BAB II..... | 24 |
| PEMBAHASAN | 24 |
| A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum | 24 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum..... | 24 |
| 2. Subyek Penegakan Hukum..... | 25 |
| 3. Jenis-Jenis Penegakan Hukum | 26 |
| 4. Faktor Penegakan Hukum | 27 |
| B. Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup..... | 28 |
| 1. Pengertian Lingkungan Hidup..... | 28 |
| 2. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup | 29 |

| | |
|---|----|
| 3. Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup | 30 |
| 4. Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup..... | 31 |
| 5. Pencemaran Lingkungan Hidup | 32 |
| C. Tinjauan Tentang Sampah..... | 34 |
| 1. Pengertian Sampah | 34 |
| 2. Jenis-Jenis Sampah..... | 34 |
| 3. Cara Pengolahan Sampah | 35 |
| D. Tinjauan Tentang Kabupaten Purworejo | 39 |
| 1. Visi Misi Kabupaten Purworejo | 39 |
| 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo..... | 40 |
| E. Hasil Penelitian | 43 |
| 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo | 43 |
| 2. Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo..... | 45 |
| 3. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Kabupaten Purworejo | 57 |
| 4. Upaya Pencegahan Pencemaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo | 65 |
| BAB III | 71 |
| PENUTUP..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 77 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika penulisan skripsi/penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Purworejo, 3 Desember 2020

Yang Menyatakan



Reynaldi Oktavianus.S

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang sampah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pola hidup masyarakat. Sampah selalu menjadi masalah yang sulit diperbaiki hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak kepada peningkatan produksi sampah di masyarakat. Beberapa penelitian menganalisis bahwa permasalahan yang banyak dijumpai dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Chaerul et al. (2007) menganalisis bahwa persoalan yang dialami dalam proses pengelolaan sampah di Indonesia, antara lain kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah kurang memadai dan dibawah standar, kurangnya upaya dalam mengadakan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Kardono (2007:631) mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa indeks yaitu tinginya jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, taraf pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah dan cenderung dibawah standar, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola

sampah dan juga biaya dapat dikatakan menjadi penghambat juga¹. Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sampah terjadi karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang lahannya sangat kurang dan berbanding terbalik dengan produksi sampah masyarakat yang sangat banyak, mayoritas terjadi di kota-kota besar, hal inilah yang menjadikan dalam pengelolaan sampah mengalami hambatan. Dampak lain dari kurangnya TPA bahwa pola hidup masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan misalnya saja membuang sampah pada selokan, laut, maupun kali hal ini sudah banyak terjadi di kehidupan masyarakat sehingga berdampak terganggunya serta dapat merusak ekosistem laut yang mana kehidupan ikan di laut menjadi terancam juga.²

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan, karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dan

¹ Rizqi Puteri Mahyudin, 2017, *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*, Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 67.

²Nining Kurnia, 2020, Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/sampah-menjadi-masalah-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 oktober 2020, pukul 22.50.

jika dilakukan secara terus menerus maka kehidupan manusia juga dapat terancam serta lingkungan menjadi rusak maka dari itu dampak yang dapat dirasakan adalah menurunnya kualitas hidup manusia seperti kesehatan yang terancam karena lingkungan yang tidak sehat tersebut.³

Sampah Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Berdasarkan pengertian diatas muncul juga persoalan tentang sampah dan berbicara demikian maka permasalahan sampah tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan hukum, Hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pengatur serta menjadi landasan terhadap kepentingan manusia pada alam disekitarnya, hukum harus ditegakkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang melindungi kepentingan masyarakat hal ini bahwa hukum harus landasan berfikir masyarakat. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan yang mensejajarkan suatu nilai yang tertuang pada suatu kaidah yang kuat dan tidak goyah serta memiliki sikap sebagai suatu runtutan suatu analisis nilai akhir dalam rangka menciptakan, memelihara, dan mempertahankan suatu kedamaian pergaulan masyarakat yang hidup dan konsisten.⁴ Sampah menjadi masalah yang terus ada terutama terjadi di kota-kota besar meskipun di desa juga terdapat masalah

³ Syarifa Yana, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup* <https://fh.unrika.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup/>, diakses 16 september 2020, pukul 16.05 WIB.

⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

tersebut, namun di pedesaan masyarakatnya lebih dapat memiliki kesempatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih acuh terhadap lingkungan hidup hal tersebut terlihat konkrit dari perilaku masyarakatnya yang membuang sampah secara sembarangan sehingga mengalami bencana alam seperti banjir. Pola hidup masyarakat yang menjadi faktor utama dalam rangka menangani permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan hidup, namun pemerintah juga memiliki peran penting juga sebagai pengatur dalam masyarakat sebagaimana menjadi landasan masyarakat dalam bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo sebagaimana yang dilansir dari *krjogja.com* pada tanggal 16 September 2018 bahwa Isu tentang kelestarian lingkungan menghadapi permasalahan yang sangat serius bahwa kerusakan alam mengalami peningkatan secara nyata dan jelas terlihat. Rendahnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi faktor penting dan memiliki peran yang besar dan berdampak pada lingkungan, jika mencapai tahapan tertentu dan jika melewati batas wajar maka dapat menjadi bencana bagi kehidupan masyarakat, dilansir dari *krjogja.com* bahwa dalam judul beritanya “Warga Purworejo Setiap Hari Hasilkan 350 Ton Sampah”. Hal ini sangat miris tentunya mengingat Kabupaten Purworejo pernah mendapatkan penghargaan Adipura yang mana penghargaan Adipura tersebut diberikan pada Kota di daerah Indonesia

yang berhasil dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Produksi sampah warga masyarakat Kabupaten Purworejo pada dasarnya sudah mencapai sekitar 350 ton setiap hari, atau 0,6 kg setiap orang. Jumlah itu pada dasarnya hampir mendekati produk sampah standar nasional Indonesia (SNI) yang ditentukan 0,7 kg per orang per 16 September 2018.⁵ Hal ini berarti masyarakat memiliki peran yang sangat krusial terhadap produksi sampah yang terjadi di Kota Purworejo, dimana produksi sampah setiap harinya sudah mencapai 350 ton setiap harinya dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Memilih Purworejo sebagai penelitian karena pada dasarnya kota kecil ini dengan penduduknya yang cenderung sedikit, namun produksi sampah per harinya tidak dapat dianggap remeh dan meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini sangat krusial untuk diteliti lebih lanjut karena Kabupaten Purworejo termasuk dalam daerah pedesaan namun pengelolaan lingkungannya kurang efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo ?

⁵Tomi Sudjatmiko, 2018, Warga Purworejo Setiap Hari Hasilkan 350 Ton Sampah, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/warga-purworejo-setiap-hari-hasilkan-350-ton-sampah/>, diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 19.54.

2. Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum serta pada perkembangan bidang hukum tertentu khususnya yaitu terletak pada bidang Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk :

- a. Bagi Pemerintah dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah untuk solusi menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah.
- b. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi maupun wawasan mengenai pelestarian lingkungan hidup, tidak melupakan juga memberi wawasan untuk penanggulangan resiko bencana alam yang diakibatkan sampah maupun pola hidup masyarakat.
- c. Bagi Penulis untuk memberikan pengetahuan serta wawasan tersendiri tentang penegakkan hukum oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup yang tercemar akibat sampah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul “Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo” merupakan hasil karya penulis secara pribadi dan bukan hasil dari plagiasi. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran penulis semata melainkan terdapat pemikiran-pemikiran pihak lain dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Berikut Penulisan Hukum atau Skripsi yang memiliki tema yang berhubungan :

- 1) a. Judul :

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan
Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Kota Medan (Studi Kasus
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Zulfahmi Hasian Siregar
- 2) NPM : 17130012
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Dharmawangsa Medan
- 5) Tahun Penelitian : 2019

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan yang mengatur tentang hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah ?
- 2) Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan ?
- 3) Bagaimana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ?

d. Hasil Penelitian

Penegakan Hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di Kota Medan harus ditegakan demi menjaga kualitas kesehatan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah

sangat penting peranannya demi mencapai suatu kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Peran pemerintah maupun masyarakat sangat penting demi menjaga kualitas lingkungan hidup, penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan hidup harus ditegakkan dengan memberi langkah preventif maupun represif. Dalam rangka melakukan pengurangan maupun penghindaran terhadap sampah terdapat metode yang dapat dilakukan seperti metode pencegahan dengan menggunakan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak. Sarana pengelolaan sampah juga harus dilakukan secara terpadu, sarana dan prasarana persampahan tersebut meliputi proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang dilakukan secara terpadu. Bahwa pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan harus saling bahu membahu dalam melakukan pencegahan maupun dalam melakukan perbaikan lingkungan hidup.

2.

a. Judul :

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

b. Identitas Penulis :

1) Nama Penulis : Balbina Elvarista

2) NPM : 140511738

- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2018

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat?

d. Hasil Penelitian

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, maka kesimpulan yang diambil sebagai berikut :

1. Belum dilaksanakan dengan baik, disebabkan beberapa hambatan berkaitan dengan pengelolaan sampah di TPA sampah pada dasarnya selama ini kurang mengalami hambatan terutama dari warga yang bertempat tinggal pada sekitar tempat pengelolaan sampah tersebut. Sampah yang berada di tempat pembuangan tersebut berserakkan dan bau yang timbul dari sampah tersebut pun sulit untuk ditangani. Pada dasarnya hal itu memperburuk keadaan dengan kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang rela membantu

pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kendala tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) yang berlokasi di desa Sibau Hulu masih kurang memadai dan tidak sesuai dengan standar dikarenakan tempat tersebut ternyata terdapat di sekitar daerah pemukiman masyarakat tempat mereka hidup dan bertempat tinggal, sehingga sampah yang sudah dibuang ditempat tersebut menimbulkan bau yang membuat masyarakat tidak nyaman terhadap lingkungan mereka sendiri.
3. Kendala dari Peraturan Pemerintah yaitu tidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak menjadif jera, seharusnya aturan tersebut harus ditaati sebagaimana fungsi hukum sebagai landasan bertindak masyarakat. Pemerintah sudah berusaha dengan usaha yang maksimal demi mengatasi permasalahan yang terjadi namun fakta di lapangan berkata lain bahwa masyarakat kurang menjaga kebersihan dan cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup.

3.

a. Judul :

Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Asthilia Ayuningtias
- 2) NPM : C86215010
- 3) Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- 5) Tahun Penelitian : 2019

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan :

1) Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di daerah aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo memenuhi unsur-unsur pencemaran yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertera dalam penjelasan pada Pasal 1 butir 14. Selain daripada itu perbuatan pencemaran lingkungan hidup dapat diberikan sanksi bagi pelanggarnya yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (2). Oleh sebab itu, pencemaran yang terjadi di Desa Kedungbanteng tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tindakan dari masyarakat dalam melakukan pembuangan sampah secara sembarangan dan tidak memperhatikan keadaan lingkungan hidup sebagai tempat mereka bertempat tinggal, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam melakukan penanggulangan pencemaran serta tidak terdapatnya opsi pemulihan fungsi lingkungan hidup dan tidak adanya penegakan hukum yang mengikat masyarakat secara keseluruhan, hukum dalam hal ini kurang berfungsi sebagaimana mestinya, maka dari itu penegakan hukum perlu ditegakkan dengan tegas.

2) Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo merupakan bentuk dari akumulasi tindakan manusia yang acuh terhadap kondisi lingkungan. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 membuang sampah sembarangan sudah dilarang dalam Islam dan haram hukumnya, hal

tersebut dapat merusak lingkaran hidup, pada dasarnya tidak dijelaskan adanya sanksi terhadap tindakan pencemaran lingkungan hidup. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah juga termuat dalam Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014, pada kenyataannya masyarakat di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo menghiraukan hal tersebut dan kemudian membiarkan sampah yang terdapat di aliran sungai mengalami penumpukkan sehingga secara langsung maupun tidak langsung sangat jelas meningkatkan pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan ketiga skripsi yang dideskripsikan hal ini sebagai pembandingan bahwa jelas sangat berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Zulfahmi Hasian Siregar lebih menekankan pada pengaturan yang mengatur tentang hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah serta menekankan pada pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang berarti melihat pencemaran lingkungan hidup menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Balbina Elvarista memfokuskan pada pengelolaan sampah pasar sebagai salah satu Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berarti Balbina Elvarista mendasarkan pikirannya terhadap pengelolaan sampah di suatu pasar sebagai salah satu cara demi mencegah pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, serta Balbina Elvarista juga memfokuskan

kepada Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam rangka mengatasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi yang ketiga yang ditulis oleh Asthilia Ayuningtias memfokuskan penulisannya tentang bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini yang berarti pencemaran lingkungan hidup tersebut ditinjau dari pembuangan sampah di aliran sungai serta bagaimana pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo ditinjau dengan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 dan hal ini berarti pencemaran lingkungan ditinjau dari pembuangan sampah dan menggunakan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 sebagai dasar tolak ukur dalam melakukan penegakan hukum. Penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis jelas berbeda dengan ketiga skripsi diatas, letak perbedaannya adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Hal ini berarti bagaimana peran pemerintah dalam rangka menegakan hukum untuk para pelanggar pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo, jelas sangat berbeda dengan ketiga skripsi pembading diatas perbedaannya terletak pada daerah serta fokus bahasannya. Kemudian dikatakan juga apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Hal ini berarti berbeda juga

dengan ketiga skripsi diatas hal ini subyek yang difokuskan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, dan topik bahasan juga mengenai hambatan dalam menegakan hukum.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang penelitiannya berfokus pada fakta sosial serta studi empiris demi menemukan suatu proses fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini memerlukan adanya data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai sarana pelengkap.

2) Sumber Data

Data yang dibuktikan dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung terhadap responden dan narasumber melalui wawancara. Pada dasarnya wawancara dilakukan dengan suatu wawancara secara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang diangkat topiknya untuk kemudian ditemukan solusinya, persiapan sebelum

wawancara yang perlu disiapkan adalah daftar pertanyaan yang sekiranya relevan dengan topik yang ingin dibicarakan. Sehingga dalam penelitian ini, diperoleh suatu data serta informasi dari lokasi penelitian terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan sebagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah maupun yang berkaitan dengan materi penelitian yang meliputi :

Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah .

Bahan Hukum Sekunder yaitu : Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, surat kabar, dan majalah ilmiah.

Bahan Hukum Tersier yaitu : Merupakan suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus⁶

3) Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian empirik adalah

a. Wawancara

Wawancara dengan narasumber sangat diperlukan dalam penelitian hukum empirik, wawancara sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu informasi dengan memberikan pertanyaan langsung dan melakukan interaksi secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga dapat relevan sebagai informasi yang valid. Adapun narasumber dalam skripsi ini adalah Ibu Maria Dini Handajani, S.T.,M.AP dengan jabatannya sebagai Kepala Bidang Sampah. , Bapak Daniel Eko Aryanto, S.T. M.Ling dengan jabatannya sebagai Bidang Penegakan Hukum. serta Ibu Dian Puji Astuti dengan jabatannya pada Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

⁶ Tommy Fernando Sedubun, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai AJKWA Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Mimika*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 12.

b. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti dan pada penulisan skripsi ini respondennya adalah Kepala Pasar Baledono, Kepala Pasar Suronegaran di Kabupaten Purworejo, Pedagang pasar Kabupaten Purworejo serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo sebagaimana sebagai pihak yang menjadi subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Responden dalam skripsi ini adalah pedagang Pasar Baledono yaitu Bagiyo Susanto, Ahmad Ramadhan, Purwanto. Responden lain juga Kepala Pasar Baledono yaitu Amat Jawari, S.E. serta Kepala Pasar Suronegaran Setyo Haryadi, serta Daniel Eko Aryanto, S.T. M.Ling. selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dalam bidang penegakan hukum.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan cara membaca, memahami, mempelajari suatu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan sekunder berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari jurnal, buku maupun internet. Pada intinya studi kepustakaan merupakan suatu proses mengumpulkan berbagai bahan,

maupun sumber dari buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷

4) Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat pada Pasar Suronegaran, Pasar Baledono, serta Dinas Lingkungan Hidup yang semuanya terdapat di Kabupaten Purworejo.

5) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Pertama-tama data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian melakukan analisis data sekunder sebagai data pendukung dari data primer, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Metode penelitian dengan sifat deskriptif ini memiliki tujuan yaitu memberikan penjelasan mengenai subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah diperoleh. Bahan hukum sekunder berupa suatu pendapat hukum yang kemudian dianalisis kemudian mencari persamaan maupun perbedaan suatu pendapat hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diberikan suatu perbandingan sehingga mendapatkan suatu penjelasan

⁷ Endria Kurnia, 2020, *Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 18.

serta pengetahuan tentang kenyataan yang terjadi dalam masyarakat demi memecahkan suatu permasalahan hukum yang timbul.

6) Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden dan demi mendapatkan informasi dalam memecahkan permasalahan yang muncul dimasyarakat. Dalam penelitian ini narasumber terkait adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yaitu Ibu Maria Dini Handajani, S.T.,M.AP sebagai pihak dinas dan sebagai kepala bagian sampah. , Bapak Daniel Eko Aryanto, S.T. M.Ling sebagai pihak dinas yang berwenang dan mengetahui mengenai penegakan hukum. serta Ibu Dian Puji Astuti sebagai pihak dinas yang berwenang dan mengetahui permasalahan pencemaran lingkungan.

7) Halangan Penelitian

Dalam Penelitian Skripsi ini terkendala berkaitan dengan waktu serta pandemi COVID-19 yang menjadi hambatan dalam proses pengumpulan data baik dari narasumber maupun responden.

G. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H yaitu: “Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Beliau juga mengatakan penegakan hukum sebagai proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa adanya dukungan serta kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, maka tidak mungkin suatu norma hukum dapat ditegakkan maupun ditaati.⁸

2. Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

3. Sampah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1 “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

4. Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 1 angka 14

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 16 oktober 2020 Pukul 1.15 WIB.

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum yang disusun ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap Pencemaran akibat Sampah di Kabupaten Purworejo.

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun hasil dari wawancara dan kuisisioner pada bab-bab sebelumnya serta penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan terkait yang mengatur hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha, sedangkan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh, hanya para pelaku usaha yang sudah memahami jika tempat usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan kemudian berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri pencemaran yang diakibatkan, sedangkan masyarakat pedesaan kurang memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah dan aturan terkait sampah dan lingkungan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah adalah kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS maupun PPLH serta minimnya SDM yang mumpuni juga menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup untuk

melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah. Hambatan lain yang ditemukan yaitu terkendala anggaran maupun biaya serta waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengenalan maupun pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3R.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo disarankan untuk lebih memberikan dan menerapkan sanksi yang lebih tegas dengan menerapkan bagi para pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah, karena produksi sampah yang terus meningkat setiap harinya baik dari sampah rumah tangga, pasar maupun dari kegiatan usaha lain. Program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yaitu menyediakan Bank Sampah yang lebih banyak disarankan agar segera diwujudkan sehingga sampah dapat dikelola dengan baik.
2. Masyarakat Kabupaten Purworejo agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kualitas lingkungan agar tidak timbul pencemaran. Disarankan juga Masyarakat Kabupaten Purworejo dapat menerapkan pengolahan sampah dengan prinsip 3R agar sampah dapat dikelola dengan baik oleh petugas kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kelima, Prenada Media, Jakarta.
- Bambang Wintoko, 2012, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Keamanan Finansial*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Emil Salim, 1983, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keempat, Mutiara, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Masrudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Marhaeni Ria Sihombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku 1*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.
- Sony Keraf, 2014, *Etika Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Husodo Mulasari, 2014, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol.8, Nomor. 8 Mei 2014, Universitas Ahmad Dahlan.
- Ketut Bagiastra Dan Si Luh Putu Damayanti, 2019, "Pengolahan Sampah Basah Dengan Menggunakan Stater Di Hotel Lombok Raya", *ISSN*, Vol.14, Nomor. 1 Agustus 2019, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram.

Skripsi

Asriyati, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (Hotel) Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Balbina Evarista, 2018, *Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Sampah Kegiatan Pasar Di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Endria Kurnia, 2020, *Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Resiko Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hiskia Virgin Lasut, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Akibat Sampah Di Kabupaten Kepulauan Yapen*, Skripsi, Program Sajarna Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rizqi Puteri Mahyudin, 2017, *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat.

Tommy Fernando Sedubun, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai AJKWA Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Mimika*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan

Recycle Melalui Bank Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 5. Sekretariat Daerah, Purworejo.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah, Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3. Sekretariat Daerah, Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 6. Sekretariat Daerah, Purworejo.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4. Sekretariat Daerah, Purworejo.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8. Sekretariat Daerah, Purworejo.

Internet

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, <https://dinlh.purworejokab.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses 12 Oktober 2020 Pukul 18.19 WIB.

Jimly Asshiddiqie, Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 16 oktober 2020 Pukul 1.15 WIB.

Nining Kurnia, 2020, Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/sampah-menjadi-masalah-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 oktober 2020, pukul 22.50.

Pemerintah Kabupaten Purworejo, Profil Kabupaten Purworejo, <https://purworejokab.go.id>, diakses 12 Oktober 2020 Pukul 18.00 WIB.

Redaksi, Raih Adipura Tapi Produksi Sampah di Tempat Ini Masih Tinggi, <https://news.okezone.com/read/2019/03/01/512/2024556/raih-adipura-tapi-produksi-sampah-di-tempat-ini-masih-tinggi>, diakses 8 Desember 2020 Pukul 04.50 WIB.

SYARIFA YANA, 2014, Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, <https://fh.unrika.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup/>, diakses 16 september 2020, pukul 16.05 WIB.

Tomi Sudjatmiko, 2018, Warga Purworejo Setiap Hari Hasilkan 350 Ton Sampah, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/warga-purworejo-setiap-hari-hasilkan-350-ton-sampah/>, diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 19.54.

<https://environment-indonesia.com/portfolio/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, di akses pada hari Senin 12 Oktober 2020, Pukul 03.22 WIB.

LAMPIRAN

Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

Tahun 2019 (JAN – DES) Kabupaten Purworejo

| NO | INDIKATOR | TARGET | | CAPAIAN | |
|----|-----------------|--------|-----|------------|--------|
| | | TON | (%) | TON | % |
| 1 | Timbulan Sampah | | | 104.874,14 | |
| 2 | Pengurangan | | 20 | 7.970,92 | 7,60% |
| 3 | Penanganan | | 80 | 14.768,01 | 14,08% |

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal, — Juli 2020
BUPATI PURWOREJO

Tabel Timbulan Sampah Kabupaten/Kota Purworejo

| TIMBULAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|--|
| Target Pengurangan | | | | |
| No | Indikator | Tahun | | |
| | | 2019 | 2020 | |
| 1 | Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) | 104.874,14 | 105.146,86 | |
| 2 | Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 20% | 22% | |
| 3 | Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Ton/Tahun) | 20.974,83 | 23.132,31 | |
| Teknis Penghitungan | | | | |
| | Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa | 718.316 | 720.184 | * (isi Jumlah penduduk) Kabupaten/Kota |
| | Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg | 0,40 | 0,40 | *Disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing |
| | Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000 | 287.32640 | 288.07360 | |
| | Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365 | 104.874,13600 | 105.146,86400 | |
| | atau Jumlah Penduduk Per tahun | | | |
| Target Penanganan | | | | |
| No | Indikator | Tahun | | |
| | | 2019 | 2020 | |
| 1 | Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) | 104.874,14 | 105.146,86 | |
| 2 | Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas | 80% | 75% | |
| 3 | Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Ton/Tahun) | 83.899,31 | 78.860,15 | |
| Teknis Perhitungan | | | | |
| | Jumlah Penduduk (JP) satuan jiwa | 718.316 | 720.184 | |
| | Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (ETS) satuan kg | 0,40 | 0,40 | *Disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing |
| | Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = (JP x ETS)/1000 | 287.32640 | 288.07360 | |
| | Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = PJTS x 365 | 104.874,13600 | 105.146,86400 | |



**Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2020 (Bulan Januari - Juni)
Kabupaten Purworejo**

| NO | INDIKATOR | TARGET | | CAPAIAN | |
|----|-----------------|--------|-----|------------|--------|
| | | TON | (%) | TON | % |
| 1 | Timbulan Sampah | | | 105.146,86 | |
| 2 | Pengurangan | | 22 | 23.622,69 | 22,47% |
| 3 | Penanganan | | 75 | 16.833,66 | 16,01% |

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal, Juli 2020
BUPATI PURWOREJO

PASAR BALEDONO

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal : **Persetujuan Selesai Penelitian**

Di Pasar Baledono Purworejo

Kepada Yth,

Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Sehubungan dengan surat saudara, tanggal 18 November 2020 dalam Hal. Permohonan Izin Penelitian/Skripsi, terhadap mahasiswa saudara :

Nama :Reynaldi Oktavianus.S
NPM :170512789
Fakultas :Hukum
Jurusan :Ilmu Hukum

Dengan ingin menerangkan bahwa mahasiswa saudara sudah selesai dalam melakukan penelitian di Pasar Baledono Purworejo, Jawa Tengah, dengan waktu pelaksanaan tanggal 19 November 2020 (1hari), dengan judul skripsi "Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo".

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Mahasiswa dimaksud untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Kepala Pasar Baledono Purworejo



Antar Jawari, S.P.

Nip.19700220-2007011022



PASAR SURONEGARAN

Perihal : **Persetujuan Selesai Penelitian
Di Pasar Suronegaran Purworejo**

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum
Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Sehubungan dengan surat saudara, tanggal 24 November 2020 dalam Hal. Permohonan Izin Penelitian/Skripsi, terhadap mahasiswa saudara :

Nama : Reynaldi Oktavianus.S
NPM : 170512789
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa saudara sudah selesai dalam melakukan penelitian di Pasar Suronegaran Purworejo, Jawa Tengah, dengan waktu pelaksanaan tanggal 25 November 2020 (1hari), dengan judul skripsi "Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo".

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada Mahasiswa dimaksud demi pengesahan.

Kepala Pasar Suronegaran Purworejo

Setyo Hartyadi
NIP. 197510072007011008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Purworejo Kode Pos 54113
Telp. (0275) 321021 Fax. (0275) 321288
Email : dinh@purworejakab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 562.42 / 2080

Dasar : Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 562.42/176/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Surat Keterangan Penelitian.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AL. BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REYNALDI OKTAVIANUS
NIM : 170512789
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas ATMA JAYA Yogyakarta.
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO



AL. BAMBANG SETYAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620405 198606 1 001

